

BAB 2

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Teoretis

2.1.1 Demografi

Demografi (*demography*) berasal dari dua suku kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *graphien* yang berarti catatan. Secara etimologi makna demografi adalah catatan atau bahasa mengenai penduduk suatu daerah pada waktu tertentu. Menurut Achille Guillard (1855) dalam (Syahardani, 2020) memberikan definisi demografi sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualnya dan kondisi moralnya.

Demografi merupakan bagian dari ilmu geografi. Dalam kajian demografi ini membahas tentang struktur tentang kependudukan dimulai dari perhitungan angka kematian, kelahiran, migrasi penduduk, jumlah penduduk hingga komposisi penduduk. Dalam demografi juga tidak membahas tentang angkanya saja, akan tetapi dari aktivitas bahkan sikap masyarakat dalam suatu wilayah. Demografi atau geografi penduduk merupakan salah satu cabang dari kajian geografi manusia yang objek studinya meliputi aspek keruangan (Vita, 2022:9)

Dalam ilmu demografi terdapat komponen-komponen yang sangat berhubungan erat dengan demografi. Adapun beberapa komponen demografi yaitu: Kelahiran (Fertilitas/Natalitas), Kematian (Mortalitas), Migrasi dan Pernikahan (Rahmad, 2020:8-14).

2.1.2 Geografi Manusia

Geografi manusia adalah cabang ilmu geografi yang bidang studinya dalam aspek spasial bumi dan subjek utamanya adalah manusia. Cabang ilmu geografi manusia terdiri dari sub-disiplin ilmu yang berfokus pada kegiatan dan organisasi manusia, seperti geografi penduduk, geografi budaya, geografi politik, geografi desa dan kota, geografi sosial dan geografi transportasi. Selain itu, geografi manusia adalah salah satu cabang ilmu yang berfokus pada pemahaman interaksi yang kompleks

antara manusia dengan lingkungan, dimulai dengan memahami, beradaptasi, dan memanfaatkan ruang fisik mereka. Aktivitas manusia dalam kegiatan bermasyarakat meliputi aktivitas, ekonomi, politik, sosial dan budaya suatu wilayah (Lasaiba, 2023).

2.1.3 Implementasi Program

Menurut Rimaru (2012) dalam (Irawan & Simargolang, 2018) Implementasi merupakan suatu proses mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri, sehingga dalam sebuah pelaksanaan kebijakannya melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Implementasi ini sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adanya sebuah aktivitas dari suatu kebijakannya menjadi salah satu bentuk untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, tanpa adanya suatu kegiatan maka tidak akan ada suatu ketercapaian.

Definisi program menurut Farida Yusuf Tayibnapis (2013: 9) dalam (Yunia, 2019) mengartikan program sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Program yang lebih bersifat operasional akan lebih mudah untuk dipahami dan dilaksanakan oleh para pelaksana. Program tidak hanya berisi yang ingin dicapai oleh pemerintah melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

Menurut Grindle (2012) dalam (Sudarniasih et al., 2020) mengemukakan pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action program* dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”. Jadi implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu

objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan bahkan memberikan sebuah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

a. Unsur-Unsur Implementasi

Unsur-unsur penting dalam sebuah implementasi menurut Tachjan (2006) dalam (Zaenal & Rahaju, 2024) diantaranya:

1. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana suatu pihak yang bertugas atau terlibat proses kebijakan publik yang dilakukan, seperti penentuan tujuan, sasaran organisasional, pelaksanaan kegiatan, perorganisasian, pengawasan dan penilaian. Berdasarkan tindakan tersebut antikan menghasilkan sebuah output yang membawa keberhasilan dalam implementasi program. Unsur pelaksana dalam program keluarga berencana yaitu kader posyandu.

2. Adanya program yang dilakukan

Sehubungan dengan program implementasi harus memiliki ciri seperti sasaran yang dicapai, jenis kegiatan yang dilaksanakan, tenaga kerja yang dibutuhkan dan besarnya biaya yang diperlukan. Program pembinaan keluarga yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

3. Target Group /sasaran

Target group merupakan kelompok sasaran dimana terdiri dari sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Sasaran program pembinaan keluarga di kampung KB Gedugan Desa Cikunten Kecamatan Singaparna yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga

Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) bahkan seluruh masyarakat kampung KB Gedugan.

b. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi

Implementasi mengacu kepada hubungan antara tujuan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Studi kebijakan publik dalam keberhasilan implementasi adanya sebuah model yang diusulkan menurut model Edward dalam (Sabilu, 2022:12-14) yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Empat diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi diartikan salah satu proses penyampaian informasi kepada orang lain. Komunikasi ini menjadikan kebijakan dalam menyampaikan informasi kebijakan dari pembuatan kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan dengan perlu disampaikan kepada orang lain, hal ini supaya para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami yang menjadi isi, tujuan dan arah. Maka dengan adanya hal ini suatu kelompok akan mempersiapkan untuk melaksanakan berbagai kebijakan dari pemerintah yang menjadi tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut sehingga dapat tercapai sesuai harapan (Sabilu, 2022:12).

2. Sumber Daya

Pada sebuah kegiatan implementasi sumber daya menjadi salah satu peran penting dalam sebuah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan. Adapun beberapa sumber daya tersebut dalam (Sabilu, 2022:12-13) diantaranya:

a. Sumber daya manusia

Menurut Edward III (Sabilu, 2022:12) sumber daya manusia hal yang paling penting dalam sebuah kebijakan hal ini disebabkan harus cukup dari segi jumlah dan harus cakap dari segi keahliannya. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementator yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber dalam program keluarga berencana yang menjadi keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan dan mengawasi program ini adalah kader posyandu dan bidan Desa.

b. Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran sangat mempengaruhi dari efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dana dan peralatan yang digunakan diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pada saat pelaksanaan. Terbatasnya anggaran yang tersedia maka akan menyebabkan kualitas dalam sebuah pelayanan kepada masyarakat akan terbatas. Sumber anggaran dalam program keluarga berencana di Desa Cikunten adalah dari dana Desa dan masyarakat kampung keluarga berencana (KB).

c. Sumber daya peralatan

Sumber daya peralatan merupakan salah satu sarana yang harus digunakan untuk mengoperasikan implementasi suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini diselenggarakan untuk memudahkan masyarakat dalam kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya dalam program keluarga berencana disediakan gedung posyandu, alat-alat kontrasepsi, alat mengukur berat badan, pengukuran tinggi badan dan sarana yang lainnya.

d. Sumber daya informasi dan kewenangan

Sumber daya informasi dan kewenangan menjadi aspek yang penting dalam implementasi. Dengan adanya sebuah informasi akan memberikan informasi yang relevan. Selain itu juga adanya sebuah kewenangan jika terjadinya sebuah permasalahan masyarakat dapat membuat keputusan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan yang telah diajukan oleh pemerintah, sehingga adanya sikap kesungguhan dalam pelaksanaannya demi ketercapaian tujuan yang ingin diraih. Implementasi kebijakan yang berhasil maka para implementornya tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan implementasi. Akan tetapi keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh kemauan para pelaksana kebijakan untuk memiliki kemauan yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan (Sabilu, 2022:14).

4. Struktur Birokrasi

Pada sebuah implementasi kebijakan harus adanya sebuah struktur organisasi dengan pembagian kewenangan dan hubungan unit-unit organisasi yang bersangkutan. Tanpa adanya sebuah organisasi maka suatu kegiatan tidak akan terlaksana dengan efektif bahkan akan menyebabkan kegagalan dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan (Sabilu, 2022:14).

2.1.4 Program Keluarga Berencana

Menurut Depkes (1999) dalam (Priyanti, 2017:53) Program keluarga berencana (KB) adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program

pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual, dan sosial budaya penduduk indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Program keluarga berencana menurut UU No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang menyebutkan bahwa “Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya” (Resnawaty et al., 2021).

Keluarga merupakan lingkungan sosial terkecil yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Lingkungan keluarga merupakan pondasi awal dalam proses perkembangan dan pertumbuhan anak, oleh karena itu kedudukan keluarga merupakan kedudukan tertinggi dalam proses perkembangan anak adalah sangat penting. Program keluarga berencana tidak terlepas dari fungsi keluarga (Susilawati, 2020).

a. Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan kelompok atau organisasi terkecil dalam masyarakat tetapi keluarga memiliki fungsi yang paling lengkap dan luas, karena pada dasarnya fungsi keluarga tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan hubungan sosial dan fisik dua insan yang melakukan perkawinan saja, melainkan kebutuhan anggota keluarga lainnya juga. Berdasarkan hal tersebut ada 8 fungsi keluarga (Herawati, 2017:39-57) diantaranya:

1. Fungsi keagamaan

Keluarga adalah tempat pertama penanaman nilai-nilai keagamaan dan pemberi identitas agama pada setiap anak yang lahir. Keluarga menjadikan tempat untuk menumbuhkan kembangkan nilai-nilai agama dan menjadikan manusia yang

berakhlak baik dan bertakwa. Selain itu juga harus melaksanakan ibadah dan tidak mengabaikan nilai-nilai toleransi.

2. Fungsi sosial budaya

Keluarga menjadikan wahana yang paling utama dalam pembinaan dan penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan bisa menghormati berbagai adat dan istiadat lingkungan sekitar. Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3. Fungsi cinta kasih

Cinta dan kasih sayang merupakan komponen penting dalam pembentukan karakter anak. Keluarga menjadikan tempat suasana penuh kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Fungsi cinta kasih dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.

4. Fungsi perlindungan

Keluarga adalah tempat bernaung atau berlindung bagi seluruh anggotanya, dan tempat untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan. Fungsi ini akan memberikan dampak kepada anggota keluarga bahkan akan mengoptimalkan tumbuh kembang anak dengan rasa aman, nyaman bahkan tentram.

5. Fungsi Reproduksi

Keluarga menjadi pengatur dalam reproduksi keturunan secara sehat dan berencana, sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Keluarga menjadi tempat mengembangkan fungsi reproduksi secara menyeluruh, termasuk seksualitas yang sehat dan berkualitas, dan pendidikan seksualitas bagi anak.

6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Keluarga sebagai tempat utama dalam memberikan pendidikan kepada anggota keluarga untuk bekal masa depannya. Pendidikan dalam keluarga diawali dengan pendidikan untuk mencerdaskan bahkan membentuk sebuah karakter dari anggota keluarga.

7. Fungsi Ekonomi

Keluarga sebagai tempat dalam membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan dan pengaturan penggunaan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup serta untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Karena pada hakikatnya semua kebutuhan anggota keluarga berasal dari keluarganya sendiri seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya.

8. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Keluarga memiliki peran mengelola kehidupan dengan tetap memelihara lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial dan lingkungan mikro dan makro. Dalam fungsi ini keluarga harus berperan penting untuk membina lingkungan sekitar seperti mengenalkan tetangganya bahkan peduli terhadap lingkungan alam sekitar.

b. Ruang Lingkup Program Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) terdapat beberapa ruang lingkup program keluarga berencana agar menjadikan masyarakat yang sejahtera, menurut Handayani (Priyatni, 2016:114) Ruang lingkup program Keluarga Berencana (KB) diantaranya:

1. Komunikasi informasi dan Edukasi
2. Konseling
3. Pelayanan Infertilitas
4. Pendidikan Seks

5. Konsultasi pra perkawinan dan konsultasi perkawinan

6. Konsultasi genetik

2.1.5 Kampung Keluarga Berkualitas (KB)

Kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu inovasi strategis yang harus mampu melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan prioritas seperti Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kampung (KB) ini merupakan salah satu tempat dijadikan sebuah sasaran untuk mengintegrasikan program dan kegiatan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan hidup masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan atau Daerah pinggiran. Hal ini dilakukan karena kemajuan sebuah kampung akan berdampak terhadap kemajuan desanya, sehingga pelaksanaan pembangunan cukup beralasan mulai dari daerah pinggiran atau kampung yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dengan adanya pembangunan yang terus menerus melalui program dana desanya (Rahmat & Sri Sugiarti, 2021)

Dalam penelitian ini terkait keluarga berencana khususnya yang terdapat di Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Cikunten yang menjadi sasaran penelitian ini khususnya kampung Gedugan. Alasan kampung Gedugan menjadi sasaran kampung keluarga berencana karena jumlah penduduknya tinggi, kurangnya pendidikan dan kesehatan bahkan termasuk wilayah pinggiran.

a. Tujuan Kampung Keluarga Berencana (KB)

Menurut (Hasriani, 2022:33) Tujuan kampung KB jangka panjang adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui Program KKBPK yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya. Adanya tujuan dari kampung Keluarga Berencana (KB) diantaranya:

1. Tujuan Kampung KB jangka pendek

- a) Meningkatkan pengetahuan pengelola kampung KB percontohan di dalam mengelola kampung KB.
- b) Meningkatkan pencapaian program KKBPK di kampung KB percontohan.
- c) Meningkatkan komitmen dan koordinasi mitra kerja di berbagai tingkatan terhadap keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait di kampung KB percontohan.

2. Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

3. Tujuan Khusus

- a) Peningkatan kualitas dan akurasi data dan peta keluarga
- b) Peningkatan jumlah peserta KB aktif (CU/PUS)
- c) Peningkatan jumlah peserta KB MJKP
- d) Peningkatan jumlah peserta KB Pria
- e) Penurunan angka unmet need
- f) Peningkatan partisipasi keluarga yang memiliki balita dalam Bina Keluarga Balita (BKB)
- g) Peningkatan partisipasi keluarga yang memiliki remaja dalam BKR
- h) Peningkatan partisipasi keluarga yang memiliki lansia dalam BKL
- i) Peningkatan partisipasi lansia dalam BKL
- j) Peningkatan partisipasi remaja dalam PIK
- k) Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan
- l) Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- m) Peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat
- n) Peningkatan status sosial ekonomi
- o) Peningkatan rata-rata lama sekolah anak usia sekolah
- p) Peningkatan lingkungan dan pemukiman yang sehat
- q) Peningkatan kualitas pembangunan sektor pembangunan

b. Kriteria Kampung Keluarga Berencana (KB)

Menurut (Surya, 2015) memilih atau menentukan sebuah wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB ada beberapa kriteria yang dipakai diantaranya:

1. Kriteria utama: yang mencakup dua hal, yaitu:
 - a. Jumlah keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata tingkat Desa/Kelurahan dimana kampung itu berada.
 - b. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat Desa/Kelurahan di mana kampung KB tersebut berlokasi.
2. Kriteria wilayah, mencakup 10 kategori wilayah, yaitu:
 - a. Kumuh
 - b. Pesisir
 - c. Daerah Aliran Sungai (DAS)
 - d. Bantaran Kereta Api
 - e. Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan)
 - f. Terpencil
 - g. Perbatasan
 - h. Kawasan Industri
 - i. Kawasan Wisata
 - j. Padat Penduduk.
3. Kriteria Khusus mencakup 5 hal, yaitu:
 - a. Kriteria data di mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga,

- b. Kriteria kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah,
- c. Kriteria program KB di mana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat Desa/Kelurahan serta tingkat unmet need lebih tinggi dari rata-rata tingkat Desa/Kelurahan,
- d. Kriteria program pembangunan keluarga di mana partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan Genre melalui PIK-R masih rendah,
- e. Kriteria program pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bisa ditambah dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan

c. Sasaran Kampung Keluarga Berencana (KB)

Menurut (Hasriani, 2022:35) Sasaran kampung KB utamanya adalah penduduk yang tinggal di wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh, dan kesertaan berKB nya masih rendah. Penggarapan program pembangunan berbagai sektor terkait di kampung KB ini diharapkan dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan fasilitasi dari Kepala Desa, Ketua RW, ketua RT, PKB/PLKB, PKK, Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), tokoh masyarakat, kader, serta lintas sektor terkait. Sasaran kampung KB terbagi menjadi sasaran langsung dan sasaran tidak langsung sebagai berikut:

- 1. Sasaran Langsung
 - a. Keluarga
 - b. Pasangan Usia Subur
 - c. Masyarakat

d. Balita, Remaja, Lansia.

2. Sasaran Tidak Langsung

a. Tokoh-tokoh masyarakat

b. Organisasi masyarakat (PPKBD, Sub-PPKBD, DKM, Organisasi pemuda, dan sebagainya)

c. Petugas lapangan dan provider.

d. Program pembinaan keluarga

Program pembinaan keluarga adalah serangkaian kegiatan dan upaya yang bertujuan untuk membentuk dan meningkatkan kualitas keluarga yang kuat, harmonis dan bertahan dalam berbagai aspek kehidupan. Program pembinaan keluarga termasuk ke dalam program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pembinaan kepada keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga untuk mencapai kesejahteraan dalam keluarga. Maka dengan hal tersebut, program pembinaan keluarga bagi menjadi 3 diantaranya:

1. Bina Keluarga Balita (BKB)

Bina Keluarga Balita merupakan salah satu kegiatan yang diperuntukan bagi keluarga yang memiliki balita. Bina Keluarga Balita adalah salah satu media pelayanan kesehatan yang memiliki berbagai jenis kegiatan yaitu penyuluhan dan bermain dengan Alat Permainan Edukatif (APE). Usia anak 0-6 tahun yang merupakan masa emas dimana anak akan berkembang dengan optimal dimasa emas tersebut, sehingga harapan dari para orang tua yang menginginkan anaknya tumbuh dan berkembang secara optimal baik dari segi kognitif, afektif, psikomotorik dan juga dari segi sosialnya membuat orang tua mengikuti program bina keluarga balita. Program bina keluarga balita ini orang tua dibina untuk dapat merawat, mengasuh, dan

mendidik anak-anaknya dengan cara yang benar, agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebanggaan keluarganya sesuai dengan yang diharapkan (Asni et al., 2020).

Menurut BKKBN (2008) pengertian mengenai Bina Keluarga Balita (BKB) yaitu: "BKB adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita melalui rangsangan fisik, motorik kecerdasan, emosional dan sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu upaya untuk dapat mengembangkan fungsi-fungsi pendidikan, sosialisasi dan kasih sayang dalam keluarga. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan tersebut diharapkan orang tua mampu mendidik dan mengasuh anak balitanya sejak dini agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia indonesia berkualitas" (Maulana, 2021).

2. Bina Keluarga Remaja (BKR)

Program Bina Keluarga Remaja merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya menciptakan ketahanan keluarga dan mewujudkan peningkatan kualitas remaja. Kelompok Bina Keluarga Remaja adalah Suatu Kelompok atau wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai remaja usia 10 - 24 tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja dalam rangka memantapkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur anggota kelompok. Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 12 tentang pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, terdapat

empat upaya pokok dalam keluarga berencana nasional diantaranya adalah pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dari keempat upaya program keluarga berencana nasional itu terbentuknya Bina Keluarga Remaja (BKR) (Alviani, 2017).

3. Bina Keluarga Lansia (BKL)

Bina Keluarga Lansia merupakan program yang ditujukan kepada keluarga yang memiliki lansia (Lanjut usia). Tujuan dari adanya program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui adanya kepedulian anggota keluarga, sehingga terbentuklah lansia yang produktif, aktif, mandiri, sehat bahkan bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat. BKL Menurut BKKBN (2013) adalah wadah kegiatan bagi keluarga yang memiliki lanjut usia yang berusaha meningkatkan kegiatan dan keterampilan keluarga dalam memberikan pelayanan, perawatan dan pengakuan yang layak sebagai orangtua bagi lanjut usia tidak potensial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga lanjut usia melalui kegiatan pemberdayaan, pembinaan, serta pengembangan potensi bagi lanjut usia. Didalam kegiatan BKL, terdapat pembinaan yang berkaitan dengan pembinaan fisik bagi lansia. Pembinaan tersebut mempertimbangkan faktor usia dan kondisi fisik yang berbeda-beda dari setiap orang. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk memberikan pembinaan atau penanganan kepada lansia sesuai dengan kebutuhan secara maksimal (Anjani & Aulia, 2018).

e. Program-Program Kampung Keluarga Berencana (KB)

Sesuai dengan amanat inpres nomor 3 tahun 2022 (Nuriah, 2022:41) tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga

berkualitas, bahwa penyelenggaraan kampung berkualitas dilaksanakan melalui 8 sasaran dan 4 program diantaranya:

1. Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan
2. Perubahan Perilaku Keluarga
3. Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga
4. Penataan Lingkungan Keluarga

Adapun untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan sebuah program diantaranya:

1. Penyediaan data dan perluasan cakupan administrasi kependudukan
2. Penguatan advokasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan perubahan perilaku masyarakat
3. Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bersumber daya masyarakat.
4. Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting
5. Peningkatan cakupan dan akses pendidikan
6. Peningkatan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan
7. Pemberdayaan ekonomi keluarga
8. Penataan lingkungan keluarga peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar.

f. Pemberdayaan Keluarga

Pemberdayaan keluarga adalah suatu Upaya untuk menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, kemampuan sumber daya dalam memelihara, meningkatkan status kesehatan, mendapatkan kontrol positif dari kehidupan serta meningkatkan kualitas hidup. Pemberdayaan termasuk salah satu komponen penting dalam proses pengembangan masyarakat. Pemberdayaan ini merujuk

kepada orang atau kelompok khusus yang rentan sehingga mereka akan memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Dalam kegiatan pemberdayaan keluarga ini mampu meningkatkan menumbuhkan keinginan dan motivasi dari diri seseorang, kesadaran dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan keluarga tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga (Ningrum, 2020).

g. Manfaat Program Keluarga Berencana bagi Masyarakat

Program keluarga berencana merupakan salah satu kesatuan dari program KKBPK di tingkat RW atau dusun. Program ini memiliki banyak manfaatnya bagi keluarga dalam bermasyarakat. Manfaat yang dirasakan atau didapatkan tidak hanya dari sisi kesehatan tetapi bermanfaat juga dari sisi ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lingkungan dalam (Marlinae & Wibowo, 2021) diantaranya:

A. Kesehatan

1. Bagi Ibu

- a) Mencegah anemia (kurang darah)
- b) KB dapat menjaga kesehatan fisik dan kesehatan reproduksi lebih optimal
- c) Mencegah perdarahan yang terlalu banyak setelah persalinan dan mempercepat pulihnya kondisi Rahim d. Mencegah Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)
- d) Mendekatkan ibu pada pelayanan kesehatan
- e) Meningkatkan keharmonisan keluarga

2. Bagi Anak

- a) Mencegah kurang gizi pada anak
- b) Tumbuh kembang anak terjamin
- c) Kebutuhan ASI Eksklusif 6 bulan dapat terpenuhi.

B. Ekonomi

- a) Mengurangi kebutuhan rumah tangga

- b) Meningkatkan pendapatan/ekonomi keluarga
- C. Sosial budaya, Pendidikan dan lingkungan
 - a) Meningkatkan kesempatan bermasyarakat
 - b) Meningkatkan peran ibu dalam pengambilan keputusan keluarga
 - c) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Sasaran remaja belum menikah. Tujuan remaja menikah di usia ideal : Perempuan 20 – 30 tahun, Laki-laki minimal 25 tahun Kegiatan program KKBPK terkait PUP antara lain : Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), Saka Kencana, dll.
 - d) Pengaturan kelahiran. Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS). Tujuan mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak, jarak ideal 3-4 tahun, jumlah 2 anak lebih baik. Kegiatan dari program KKBPK terkait Pengaturan Kelahiran. Pelayanan KB (Rutin, TMKK-KB-Kes, PKK KB-Kes) jaminan pasca pelayanan, dll
 - e) Pembinaan Ketahanan Keluarga. Sasaran keluarga yang memiliki anak balita, remaja dan lansia. Tujuan meningkatnya ketahanan dan keharmonisan keluarga. Kegiatan dari program KKBPK terkait Pembinaan Ketahanan Keluarga. Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL).
 - f) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Sasaran seluruh keluarga. Tujuan meningkatnya kesejahteraan keluarga, ukurannya dapat melaksanakan 8 fungsi keluarga. Kegiatan dari program KKBPK terkait dengan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga adalah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
 - g) Pengelolaan Kependudukan. Sasarannya adalah penduduk. Tujuan pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk. Kegiatan dari Program KKBPK terkait dengan

pengelolaan kependudukan antara lain sosialisasi dampak kependudukan, pendidikan kependudukan, dan penyusunan grand design pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.

2.2 Hasil Penelitian Relevan

Penelitian relevan menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilakukan perlu adanya penelitian yang sudah dilakukan di penelitian sebelumnya. Dengan adanya sebuah penelitian terdahulu akan memperkuat penelitian ini. Berikut beberapa penelitian relevan yang masih terkait dengan penelitian yang sedang diteliti:

Tabel 2.1
Penelitian Relevan

Subjek	Lilis Noviasari	Erma JuliaRatman	Eveline Ramadhiani
Tahun	2023	2020	2022
Instansi	Universitas Siliwangi	Universitas Siliwangi	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Judul	Efektifitas Program Keluarga Berencana (KB) dalam Implementasi Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) di Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya	Partisipasi masyarakat terhadap program keluarga berencana (KB) dalam mengendalikan jumlah kelahiran di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya	Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Kebayoran Lama Utara (Studi Kasus Kampung KB RPTRA Delas)
Rumusan Masalah	1.Efektivitas program keluarga berencana (KB) dalam implementasi norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) kelahiran di Desa Mangunreja	1.Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat terhadap program keluarga berencana (KB) dalam mengendalikan jumlah kelahiran di Desa Selawangi	1.Bagaimana Unsur-unsur pada implementasi kampung berencana (KB) RPTRA Delas dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di

	Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya? 2.faktor-faktor yang mampu mempengaruhi efektivitas program keluarga berencana (KB) dalam implementasi norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) di Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya?	Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya 2.faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap program keluarga berencana (KB) dalam mengendalikan kelahiran di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya	kelurahan kebayoran lama utara? 2. Bagaimana indikator keberhasilan pada implementasi program keluarga berencana (KB) RPTRA Delas meningkatkan kesejahteraan keluarga di kelurahan kebayoran lama utara?
Metode Penelitian	Deskriptif Kuantitatif	Deskriptif Kuantitatif	Deskriptif Kualitatif
Lokasi Penelitian	Desa Mangunreja	Desa Selawangi	Kelurahan Kebayoran Lama Utara (Studi Kasus Kampung KB RPTRA Delas)

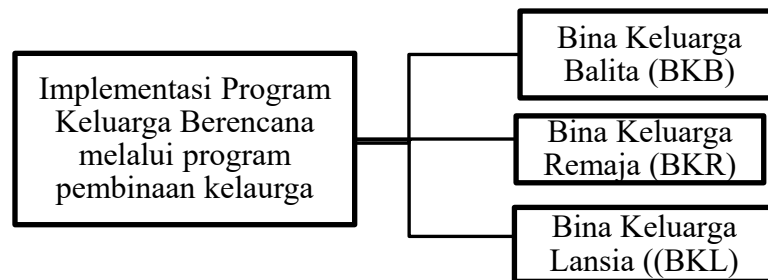
Sumber: Hasil Analisis 2024

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berdasarkan pada penyusunan dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan dari adanya penelitian yang didukung dengan adanya sebuah kajian teoritis dan adanya penelitian yang relevan berikut kerangka konseptual dari judul "Implementasi Program Keluarga Berencana di Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya".

2.3.1 Kerangka Konseptual 1

Bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana melalui program pembinaan keluarga di Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya



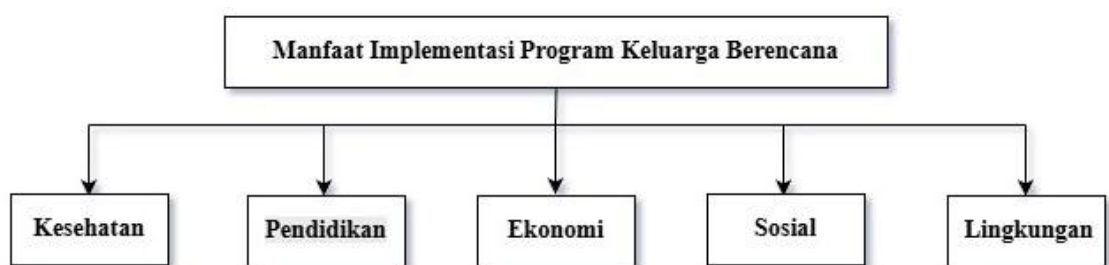
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 1

Kerangka konseptual 1 membahas mengenai bagaimana implementasi program keluarga berencana melalui program pembinaan di Desa Cikunten meliputi program yaitu pembinaan keluarga diantaranya: program pembinaan keluarga balita (BKB), program pembinaan keluarga remaja (BKR), dan program pembinaan lansia (BKL)

2.3.2 Kerangka Konseptual 2

Apa Manfaat Implementasi Program Keluarga Berencana bagi masyarakat di Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual 2

Kerangka konseptual 2 membahas tentang manfaat implementasi program keluarga berencana yang ada di Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Adapun untuk manfaat yang dapat

diambil dari implementasi program keluarga berencana ini adalah dari kesehatan, pendidikan dan ekonomi, sosial dan lingkungan.

2.4 Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat pertanyaan yang diberikan kepada responden. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu program keluarga berencana di Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teoritis sehingga penulis menyusun pertanyaan kepada responden sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program keluarga berencana program melalui pembinaan keluarga di Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya?
 - a. Apa saja program keluarga berencana yang diikuti?
 - b. Sejak kapan sudah mengikuti program keluarga berencana?
 - c. Apa saja kendala yang dihadapi dalam program keluarga berencana?
 - d. Bagaimana pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dari program keluarga berencana?
 - e. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung program keluarga berencana?
2. Apa manfaat implementasi program keluarga berencana bagi masyarakat desa cikunten kecamatan Singaparna kabupaten Tasikmalaya?
 - a. Apakah dengan mengikuti program keluarga berencana sudah merasakan menjadi keluarga yang berkualitas?
 - b. Apa yang dirasakan dari manfaat program keluarga berencana?
 - c. Apakah dengan program keluarga berencana meningkatkan pendidikan di masyarakat Desa Cikunten?
 - d. Apakah ada peningkatan ekonomi yang dirasakan setelah mengikuti program keluarga berencana?
 - e. Bagaimana manfaat sosial dan lingkungan setelah dibentuknya kampung KB?

- f. Bagaimana kondisi kesehatan yang dirasakan setelah mengikuti program keluarga berencana?